

**ANALISIS DINAMIKA POLITIK DI BALIK TUNTUTAN
PEMEKARAN CILACAP BARAT**

Bisri Halim¹, Dr. Dra. Kushandajani, M.S²,

Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si³

Bisrihalim@gmail.com

ABSTRACT

Regional splitting is a part of important things common way in any democratic countries such as Indonesia as the form and impact caused by decentralisation. Regional splitting is one of the way to increasing the public service in the purpose of creation for welfare society.

The plan of regional split for west cilacap which discussed on this thesis. The writer will trying to describe how the political dynamic that occur in west cilacap regional splitt process. Start from how the political actor and organization in kabupaten Cilacap designing the plan of regional split for west cilacap could make a dynamic political constelation between them.

This thesis, using a qualitative metodh with many technic such as observation and interview with many stakeholders which participating in the plan for west cilacap regional split and also using study documentation to collect some documents related to this thesis. Data analysis technique used by writer is data reduction where the writer sorting, simplifying, and transform the data obtained in the field.

The results of this thesis shows the dynamics of the political forces in the District Cilacap influenced by political actors and organizations in the District Cilacap.

Keyword : Regional splitting, West Cilacap, Political analysis

ABSTRAKSI

Pemekaran Daerah merupakan hal yang cukup penting bagi suatu negara demokrasi seperti Indonesia karena merupakan suatu wujud dan dampak diselenggarakannya desentralisasi. Pemekaran daerah merupakan salah satu jalan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga dapat tercipta kesejahteraan sosial di masyarakat.

Dalam rencana pemekaran Kabupaten Cilacap Barat yang tertulis dalam penelitian ini, Penulis menguraikan bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam pemekaran Cilacap Barat, yaitu tentang bagaimana peran para aktor politik dan organisasi pemekaran di

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

² Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Kabupaten Cilacap dapat memunculkan sebuah dinamika politik dalam rencana pemekaran Cilacap Barat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menampilkan data-data yang deskriptif dengan berbagai macam teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara langsung dengan para tokoh yang terlibat di dalam rencana pemekaran Cilacap barat, dan juga dengan studi dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dimana peneliti memilah, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dinamika kekuatan politik di Kabupaten Cilacap yang dipengaruhi oleh para aktor politik dan organisasi pemekaran di Kabupaten Cilacap

Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Cilacap Barat, Analisis Politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Runtuhnya rezim orde baru Presiden Soeharto pada tahun 1998 telah melahirkan sistem demokratisasi baru di Indonesia sepertihalnya dalam hal kewenangan daerah dalam mengelola urusannya sendiri. Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah secara resmi pada tanggal 1 Januari 2001, memunculkan keinginan masyarakat di daerah untuk menggerakkan pemekaran daerah karena berbagai alasan. Pemekaran yang diangkat terkait dengan ekspektasi-ekspektasi dan keluhan- keluhan di tingkat lokal. Ekspektasi lokal yang dimaksud adalah kemauan dan kemampuan daerah untuk membentuk dan memfungsikannya dalam rangka mewujudkan efektifitas yang lebih baik.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap adalah kabupaten terluas di provinsi Jawa Tengah dengan luas 225. 360,840 Ha yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan. Luasnya kabupaten Cilacap memicu tumbulnya ketimpangan dalam hal pemerataan pembangunan dan urusan administrasi. Ketimpangan tersebut sangat dimungkinkan terjadi pada daerah-daerah yang letak geografisnya jauh dari kota. Hal inilah yang juga melatar belakangi warga Cilacap bagian barat untuk menyuarakan pemekaran di daerahnya.

Faktor kesenjangan, kesejahteraan, jarak dan ketimpangan dalam urusan administrasi menjadi keluhan utama warga cilacap bagian barat. Jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan daerah juga berdampak pada lambatnya masyarakat dalam mengakses informasi dan urusan administrasi karena warga cilacap bagian barat harus menempuh waktu 2,5 jam untuk mengurusnya ke pusat kabupaten. Beberapa dukungan diberikan untuk merealisasikan wacana pemekaran tersebut. Perjuangan masyarakat Cilacap bagian barat

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

² Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

dalam mewujudkan Cilacap barat sebagai daerah otonom baru diapresiasi dalam berbagai organisasi diantaranya adalah Paguyuban Warga Cilacap Barat(PWCB) dan Majelis Rakyat Cilacap Barat (marciba) yang dibentuk di kecamatan Sidareja pada tanggal 10 November 2006 serta Yayasan Alumni Pelajar Cilacap Barat(Yapaciba) yang dibentuk 31 Maret 2013 silam. Selain itu, telah dibentuk juga dewan presidium pemekaran Cilacap Barat yang diketuai oleh Bambang Suharto.

Mengacu Pada PP nomor 78 tahun 2007 , persyaratan administratif poin pertama didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Dalam penjelasan PP 78 Tahun 2007 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “aspirasi sebagian besar masyarakat setempat” adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan Keputusan FKK atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Hal ini telah terpenuhi dengan hasil kajian Universitas Jenderal Soedirman tahun 2009 yang menunjukkan bahwa sebanyak 99 dari 129 desa di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat atau sebesar 76,74% memberikan rekomendasi dukungan pemekaran, kemudian poin kedua yaitu usulan bupati kepada Gubernur juga sudah direalisasikan dengan digelarnya pertemuan antara Bupati dan komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah serta para akademisi yang menghasilkan permohonan penerbitan surat rekomendasi pemekaran oleh gubernur Jawa Tengah guna disampaikan ke pusat untuk dimasukkan dalam prolegnas.

Hal yang menarik adalah mengapa pemekaran Cilacap Barat menuai pro dan kontra meskipun dari uji kelayakan sudah layak untuk segera dimekarkan. Mengacu pada hal tersebut munculah kemungkinan adanya faktor politik yang sedang bermain. Kekuatan politik yang cenderung konsisten di Kabupaten Cilacap dan semakin dekatnya pemilihan bupati yang baru dimungkinkan melibatkan unsur kekuatan partai politik yang ikut andil dalam menyuarakan pemekaran Cilacap Barat. Sepertihalnya Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB) yang didalamnya terdapat anggota DPC Partai PDIP yang juga menjabat sebagai sekretaris umum, selain itu ketua presidium pemekaran Cilacap Barat Bambang Suharto yang digadag-gadag bakal mencalonkan diri menjadi bupati.. Hal ini semakin menguatkan adanya motif politik didalam rencana pemekaran Cilacap barat.

’Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, untuk memfokuskan penelitian maka peneliti mengangkat judul “Analisis Politik Dibalik Tuntutan Pemekaran Cilacap Barat Sebagai Daerah Otonom”.

KERANGKA TEORI

1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial itu dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Jadi ada sekelompok besar rakyat yang terlibat secara sadar untuk menuntaskan sebuah proses perubahan sosial. Selanjutnya gerakan sosial ini gelombang pergerakan dari

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

² Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

individu-individu, kelompok yang mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perubahan sosial. Indikasi awal untuk menangkap gejala sosial tersebut adalah dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena publik dan ditandai oleh kualitas “aliran” atau “gelombang”. Dalam prakteknya suatu gerakan sosial dapat diketahui terutama lewat banyak organisasi baru yang terbentuk, dan bertambahnya anggota dalam suatu organisasi gerakan.

Selain itu menurut Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan adalah, pertama, aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati umur itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi gerakan telah mengalami proses “*cooled down*”. Kedua, banyak organisasi gerakan atau protes yang berubah menjadi gerakan sosial atau setidaknya bagian dari gerakan-gerakan tersebut¹.

Organisasi-organisasi ini cenderung selalu berupaya menciptakan gerakan sosial atau jika organisasinya berbeda maka mereka akan dengan sabar menunggu pergeseran struktur makro yang akan terjadi (misalnya krisis kapitalis) atau pertarungan yang akan terjadi antara yang baik dan yang jahat, atau kedua hal tersebut. Serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral, kala itulah gerakan itu bisa dikenali sebagai gerakan pinggir, gerakan awal dan embrio gerakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Maksudnya adalah mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang latar belakang munculnya tuntutan pemekaran daerah di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat.

HASIL PENELITIAN

Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap tidak hanya berdampak pada jauhnya jarak tempuh, melainkan juga berdampak pada timbulnya beberapa masalah baik sosial, politik, maupun ekonomi. Luasnya Kabupaten Cilacap juga menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur sebagai instrumen masyarakat untuk mengembangkan sektor perekonomian tidak tercapai secara maksimal seperti yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat Cilacap Barat.

Berangkat dari permasalahan tersebut para kelompok dan tokoh-tokoh muda di wilayah Cilacap Barat mulai melakukan konsolidasi dimulai sejak tanggal 10 November 2006 bertempat di wilayah kecamatan Sidareja dan dihadiri oleh perwakilan tokoh-tokoh

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

²Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

kecamatan lainnya seperti Wanareja, Dayaehluhur, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, dan Sidareja dan menghasilkan kesepakatan membentuk wadah perjuangan pemekaran Cilacap Barat yang akhirnya diberi nama Paguyuban Warga Cilacap Barat.

Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagian besar sudah memenuhi syarat teknis maupun administratif pemekaran wilayah yang tercantum dalam PP 78 Tahun 2007. Syarat administrasi telah terpenuhi dengan penyampaian aspirasi yang diwakili BPD dan FK dengan 99 dari 129 desa di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat atau sebesar 76,74% pada survey tahun 2007 memberikan rekomendasi pemekaran, sementara kajian kelayakan terbaru di tahun 2014 dari 10 kecamatan dan 129 desa 100% memberikan rekomendasi pemekaran.

1. Dukungan Pemekaran Cilacap Barat

a. Paguyuban Warga Cilacap Barat

Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang menjadi pelopor pertama sekaligus penggerak pemekaran Cilacap Barat. PWCB didirikan pada Tanggal 10 Nopember 2006 atas dasar persamaan pandangan tentang pemerataan pembangunan Cilacap Timur dan Cilacap Barat. PWCB merupakan sebuah pergerakan awal dimana pada saat itu masyarakat mulai tergerak dan mulai mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak.

b. DPRD Kabupaten Cilacap

Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap secara kelembagaan mendukung sepenuhnya terhadap pemekaran Cilacap Barat sebagai daerah otonom. Setelah itu DPRD, PWCB dan Pemkab Cilacap melaksanakan studi banding pemekaran ke Kabupaten Ciamis pada tanggal 21-22 Juni 2007. Setelah melakukan studi banding DPRD Kabupaten Cilacap secara resmi mengeluarkan surat dukungan pemekaran Cilacap Barat tanggal 9 Juli 2007 nomor 125/0497/12 yang dialamatkan kepada Bupati. Dasar dikeluarkannya surat keputusan tersebut adalah berdasarkan hasil dari jajak pendapat pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap dengan para penggiat pemekaran pada bulan Mei 2007 sekaligus hasil dari studi banding Komisi A dan Komisi B DPRD Cilacap ke Kabupaten Ciamis. Setelah dilakukan uji kelayakan oleh Universitas Jenderal Soedirman, DPRD kembali mengeluarkan surat persetujuan pemekaran dengan nomor 146.1/16/13/2010.

c. Organisasi Keagamaan (NU)

Kabupaten Cilacap yang sebagian besar masyarakatnya merupakan warga Nahdliyin tak jarang menjadikan kiai ataupun ulama NU sebagai patokan dalam menentukan suatu keputusan politik. Sepertihalnya dalam upaya pemekaran Cilacap Barat, NU mendukung sepenuhnya pemekaran tersebut dengan mengapresiasi pihak-

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

² Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

pihak yang telah berjuang untuk memekarkan Cilacap Barat karena pemekaran merupakan solusi yang dianggap tepat sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap bagian barat.

d. Lembur Kuring Cilacap Barat (LKCB)

Lembur Kuring Cilacap Barat merupakan organisasi penggiat pemekaran yang lebih terkonsentrasi di area Cilacap Barat yang berbudaya dan berbahasa Sunda seperti Majenang, Dayeuhluhur, Wanareja, Cipari, Karangpucung dan Cimanggu. Pada awalnya LKCB lebih setuju terhadap pemekaran kabupaten Majenang dengan enam kecamatan utama tersebut. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penyebaran dan pemasangan baliho bertuliskan “selamat datang di Kabupaten Majenang” yang dipasang di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat.

e. Presidium Cilacap Barat

Berawal dari organisasi Yayasan Pelajar dan Alumni Cilacap Barat (Yapaciba), Dewan presidium pemekaran Cilacap barat dibentuk pada Tahun 2013 yang diketuai oleh H. Bambang Suharto, SE yang juga menjabat sebagai dewan pembina Yapaciba. Beliau merupakan putra daerah asli dari Cilacap Barat yang telah lama memendam cita-citanya memekarkan Cilacap Barat. Tim presidium pemekaran Cilacap Barat memiliki tujuan untuk memerjuangkan dan mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan pemekaran cilacap barat, dan mensosialisasikan gagasan pemekaran, serta mengkomunikasikan aspirasi pemekaran kepada pejabat-pejabat yang berwenang seperti Gubernur, Bupati dan DPRD.

f. PDI-Perjuangan Kabupaten Cilacap

Berdasarkan peta politik anggota legislatif dari beberapa kali periode pemilu legislatif, PDI-Perjuangan memang menguasai kursi di DPRD bersama dengan Golkar sejak awal pemilu langsung hingga terakhir. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, PDIP mengatakan bahwa pemekaran wilayah selalu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan. Hal inilah yang dianggap dapat membantu proses pemekaran Cilacap barat. PDI-Perjuangan sebagai Partai yang cukup berkuasa di Kabupaten Cilacap diharapkan mampu mengawal dan memproses usulan pemekaran Cilacap Barat ke Tahapan yang lebih jauh.

2. Tanggapan Bupati Cilacap

Bupati secara resmi mengeluarkan surat persetujuan pemekaran Cilacap Barat yang berupa Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 136/221/01/2010 untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan menginstruksikan kepada penggiat pemekaran agar menyatukan suara terlebih dahulu mengenai usulan calon

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

² Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ibukota Cilacap Barat yang saat itu terjadi perpedaan pendapat. Namun seiring berjalannya waktu Tatto Suwanto Pamuji yang terpilih menjadi Bupati Cilacap di Tahun 2012 terkesan sudah terlalu jenuh dengan wacana pemekaran Cilacap Barat sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa Bupati kurang serius dalam mendukung pemekaran Cilacap Barat.

3. Tanggapan Pemerintah Propinsi

Pada tahapan audiensi dengan Gubernur Ganjar Pranowo yang digelar pada hari Senin 8 September 2014 yang juga dihadiri oleh LPPM UNSOED, Bupati Cilacap, Presidium Pemekaran, Bappeda Cilacap, DPRD Cilacap beserta dengan tokoh masyarakat dari Cilacap, telah disampaikan pemaparan kajian ilmiah pemekaran yang dilakukan oleh LPPM Universitas Jenderal Soedirman. Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo menyambut positif hasil pemaparan kajian ilmiah pemekaran walaupun masih terdapat beberapa data yang kurang seperti ceklis data dari DPPKAD dan kesanggupan Bupati dalam memberikan peresentase PAD kabupaten induk ke kabupaten yang baru.

4. Perbedaan Pandangan Tentang Konsep Pemekaran Cilacap Barat Menciptakan Dinamika antar Kekuatan Politik di Kabupaten Cilacap.

Pada proses pemekaran Cilacap Barat telah terjadi dinamika kekuatan politik antar para aktor politik di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut terlihat pada “pertarungan” dua partai penguasa di Kabupaten Cilacap yaitu PDI-Perjuangan dan Golkar untuk berebut “menguasai” daerah-daerah hasil pemekaran di wilayah Cilacap Barat. Meskipun tidak nampak di permukaan, namun dua partai politik tersebut berafiliasi dengan beberapa organisasi masyarakat yang menyuarakan pemekaran Cilacap Barat. Dimulai dengan perdebatan mengenai letak calon ibukota Cilacap Barat nantinya hingga penetapan jumlah kecamatan yang akan dimekarkan.

Sejak awal munculnya isu pemekaran Cilacap Barat, Paguyuban Lembur Kuring lewat Aliansi Masyarakat Dayaehluhur memang lebih memilih untuk memekarkan Kabupaten Majenang yang terdiri dari 6 kecamatan saja. Alasannya dikarenakan 6 kecamatan tersebut sangat berbeda latar belakang budayanya yang lebih condong ke budaya sunda. Namun selain alasan perbedaan budaya tersebut muncullah isu lainnya yaitu dikarenakan kepentingan politik partai Golongan Karya (Golkar).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses rencana Pemekaran Cilacap Barat telah menciptakan dinamika kekuatan politik tertentu di Kabupaten Cilacap. Dinamika tersebut terlihat ketika terdapat

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

²Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

banyaknya perbedaan pandangan dan konsep tentang pemekaran Cilacap Barat. Salah satu contohnya perbedaan pandangan antara PWCB dan LKCB tentang jumlah kecamatan yang bakal dimekarkan dan letak calon pusat pemerintahan Cilacap Barat. Walaupun saat ini sudah mencapai kesepakatan, namun keduanya saat itu kukuh untuk memenangkan suaranya dengan dasar asumsi masing-masing pihak. Setelah diteliti ternyata organisasi tersebut kemungkinan besar berafiliasi pada partai politik penguasa di Kabupaten Cilacap yaitu PDI-Perjuangan dan Golkar. Kedua partai tersebut tentu saja berperan aktif dalam rencana pemekaran Cilacap Barat dikarenakan memang sebagian besar wilayah kecamatan di Cilacap bagian barat merupakan lumbung suara dua partai penguasa tersebut.

2. Kekuatan politik yang berperan dalam rencana pemekaran Cilacap Barat terdiri dari para aktor politik yang ikut tergabung ataupun berafiliasi dengan partai politik penguasa di Kabupaten Cilacap

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk pemerintah Kabupaten Cilacap, sebaiknya lebih transparan dalam mengemukakan perkembangan terkini dan perihal penghambat proses-proses pemekaran Cilacap Barat.
2. Para pihak yang terkait pemekaran haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan kelompoknya.

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

²Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

DAFTAR PUSTAKA

- H.R. Makagansa, *"Tantangan Pemekaran Daerah"*, Yogyakarta : Fuspada, 2008
- Ratnawati, Tri, *"Pemekaran Daerah :Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi"*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009
- Saile, Said, *"Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia"*, Jakarta : Restu Agung, 2009
- Ida, Laode, *"Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia"*, Media Indonesia. Jakarta, 2005
- Ratnawati, Tri, *" Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah : Revisi Mendasar Terhadap PP 129 Tahun 2000"*. Jakarta : Yayasan Harkat Bangsa, 2005
- Widjaja, H.A.W, *"Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia"*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Kaloh, DR.J, *" Mencari Bentuk Otonomi Daerah"*, PT Rineka Cipta: Jakarta 2007
- Juliantara, Dadang, *"Pembaruan Kabupaten Arah Realisasi Otoda"*, Pustaka Jaya Mandiri: Jakarta. 2004
- Nurcholis, Hanif, 2007, *" Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah"*, Grasindo: Jakarta. 2007
- Argama, Rizki, *"Pemberlakuan Otonomi daerah dan Fenomena Pemekaran wilayah di Indonesia"*, Universitas Indonesia, Jakarta : 2005
- Widjaja, H.A.W, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004
- Agus Santoso, H.M, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

² Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

REGULASI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

PP nomor 78 tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

MEDIA INTERNET

Jelang Pilkada pemekaran cilacap barat jangan dijadikan komoditas politik. Dalam <http://fokuscilacap.com/jelang-pilkada-2017-pemekaran-cilacap-barat-jangan-dijadikan-komoditas-politik> diakses pada 9 Pebruari 2016 pukul 22.50 WIB

Bupati kurang setuju, DPRD jateng setuju pemekaran cilacap barat secepatnya. Dalam <http://www.fokuscilacap.com/bupati-kurang-setuju-dprd-jateng-setujui-pemekaran-cilacap-barat-secepatnya> diakses pada 9 Pebruari 2016 pukul 22.55

Gubernur Tolak Pemekaran Kabupaten/Kota. Dalam <http://solopos.com/2010/01/21/gubernur-tolak-pemekaran-kabupatenkota-12616>, diakses pada 2 Mei 2016 pukul 22.03

Muhammad Ridlo Susanto www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=1950 Diakses pada 6 April 2016 pukul 19.30 WIB

HumasJtg1, *Persiapan Daerah Otonomi Baru Cilacap Barat Minimal Tiga Tahun.* Dalam <http://jatengprov.go.id/id/newsroom/persiapan-daerah-otonomi-baru-cilacap-barat-minimal-tiga-tahun>, Diakses pada 7 Mei 2016 pukul 19:45 WIB

Joko Mulyono, *laporan terkini pemekaran cilacap barat.* Dalam <http://fokuscilacap.com/begini-laporan-terkini-soal-pemekaran-cilacap-barat> Diakses pada 2 Mei 2016 Pukul 11.45 WIB

Masyarakat lebih pilih kabupaten majenang daripada cilacap barat. dalam <http://fokuscilacap.com/masyarakat-lebih-pilih-kabupaten-majenang-daripada-cilacap-barat> edisi Rabu 27 April 2016

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bisrihalim@gmail.com

² Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

D. Roy Wijaya, *Tantangan Pemekaran dan Dinamika Pertarungan Pilkada Cilacap*,
<http://fokuscilacap.com/tantangan-pemekaran-dan-dinamika-pertarungan-pilkada-cilacap>,
Diakses pada 4 Mei 2016 pukul 20.15 WIB

¹Bisri Halim, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro,
Bisrihalim@gmail.com

²Dr. Dra. Kushandajani, M.S, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

³Wachid Abdurahman, S.IP, M.Si, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro